

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab pertama pada tesis ini merupakan pendahuluan penelitian yang secara garis besar berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan. Berikut uraian dari masing-masing sub bab tersebut :

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena globalisasi yang ditandai dengan tingkat perubahan yang radikal dan cepat, perkembangan teknologi yang pesat, tingkat pluralisme yang meningkat mengakibatkan pemerintahan tradisional tidak lagi mampu mengatur dan mengakomodasi perubahan yang terjadi. Diperlukan pihak luar, masyarakat dan pihak swasta, untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan urusan-urusan publik. Pemahaman baru akan arti pemerintah menandakan terbukanya partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam menentukan jalannya pemerintahan. Dengan kata lain, untuk menghadapi berbagai bentuk perubahan yang terjadi, diperlukan manajemen pemerintahan yang responsif, akomodatif dan partisipatif. Pemerintahan yang sentralistik seperti Orde Baru dipandang tidak lagi mampu menjawab aspirasi dan harapan-harapan masyarakat kedepan. Kemudian bergulirlah desentralisasi dan otonomi daerah yang kemudian diatur dengan UU. No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 sebagai solusi nyata dari keinginan-keinginan masyarakat di era global ini. Dengan kata lain, *grand design* otonomi daerah telah berubah dari *efficiency model* (menekankan efisiensi dan keseragaman) menjadi *participatory model* (menekankan pada nilai demokrasi dan keberagaman)¹.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 7 Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Bhenyamin Hoessein. *Kebijakan Desentralisasi*. (Jurnal Administrasi Negara Vol.1, No. 02, Maret 2002), h. 2.

Dalam pengertian ini terdapat persebaran *political authority* (keputusan politik atau pembuatan kebijakan) dan *administrative authority* (keputusan-keputusan administrasi). Sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 yang dimaksud otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Rasyid (2000), desentralisasi dan otonomi daerah mempunyai tempatnya masing-masing. Istilah otonomi lebih pada *political aspect* (aspek politik – kekuasaan Negara). Desentralisasi lebih cenderung pada *administrative aspect*. Namun, jika dilihat dari konteks *sharing of power* (berbagi kekuasaan), kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan erat dan tak dapat dipisahkan².

Pemerintah daerah melaksanakan berbagai urusan pemerintahan berdasarkan pembagian urusan yang telah ditetapkan UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan tersebut dibagi dua, yaitu urusan yang bersifat *absolute function* atau mutlak menjadi urusan Pemerintah Pusat (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama) dan urusan yang bersifat *concurrent function* atau urusan bersama yang dikerjakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dengan tiga kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Selanjutnya urusan pemerintahan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut terdiri dari urusan wajib berupa pemberian pelayanan dasar dan urusan pilihan berupa pengembangan sektor unggulan. Diantara urusan wajib tersebut, pendidikan merupakan sektor pelayanan yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah selain kesehatan, lingkungan, pekerjaan umum dan perhubungan. Beberapa urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah

²J. Kaloh. Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). h. 9.

daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk menjamin setiap warga Negara di seluruh NKRI mendapat pelayanan minimal yang sama.

Sedangkan dalam menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan, pemerintah daerah dilengkapi dengan organisasi perangkat daerah sesuai dengan urusan yang ditangani. Organisasi tersebut bisa berbentuk kantor, badan dan dinas. Sektor pendidikan ditangani oleh sebuah dinas pendidikan. Dinas pendidikan berperan sebagai lembaga yang mewakili pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pendidikan.

Mengikuti nafas baru dalam pembagian urusan pemerintahan di dunia pendidikan tersebut, lahirlah desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan pada hakekatnya merupakan pengakuan bahwa proses pendidikan tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau semuanya dikontrol dari pusat³. Dengan kata lain, daerah mempunyai peran yang lebih besar dalam menentukan kualitas pendidikan. Bukan itu saja, desentralisasi pendidikan berarti juga adanya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 8 menyebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Keterlibatan ini juga termasuk dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (Pasal 9).

UU. No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur mengenai pengelolaan pendidikan. Pasal 50 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah bertugas menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu. Pada pasal 50 ayat 4 disebutkan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Propinsi yaitu melakukan koordinasi atas

³ Zamroni. Paradigma Pendidikan Masa Depan. (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000). h. 21.

penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya Pasal 50 ayat 5 disebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Pengelolaan ini tentu saja melalui dinas pendidikan setempat. Kini, pendidikan bukan lagi urusan wajib pemerintah pusat. Pendidikan termasuk urusan pemerintahan yang didesentralisasikan.

Nampaknya desentralisasi pendidikan merupakan salah satu usaha untuk menemukan solusi bagi peliknya masalah pendidikan di negeri ini. Kondisi dunia pendidikan ternyata masih terjerembab dalam masalah klasik pendidikan, yang masih membahas mengenai mutu pendidikan, perluasan kesempatan pendidikan, relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan efisiensi manajemen.

Dengan bergulirnya desentralisasi pendidikan, maka dibutuhkan pemerintah daerah yang penuh inovasi dan komitmen bagi kemajuan pendidikan di daerahnya melalui dinas pendidikan. Kemandirian, kepedulian dan tanggung jawab juga sangat dibutuhkan dalam menggunakan anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBD untuk peningkatan pelayanan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan secara bertahap. Dinas pendidikan berperan begitu penting dalam mengarahkan dan menjadikan pendidikan di daerahnya berdaya saing, maju dan berkualitas. Usaha-usaha yang penuh kreatifitas dalam mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan oleh dinas pendidikan setelah terputusnya kontrol dari pusat melalui asas dekonsentrasi seperti pada masa Orde Baru.

Diantara ratusan daerah otonom yang melaksanakan desentralisasi pendidikan adalah Kota Metro. Daerah otonom ini telah didukung oleh suatu pemerintahan yang memandang begitu pentingnya masalah pendidikan. Hal ini tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro yang menyebutkan bahwa Visi Pembangunan Jangka Menengah dalam rangka membangun Kota Metro ke depan selama 5 (lima) tahun

adalah: " Terwujudnya Kota Metro Sebagai Kota Pendidikan yang Asri, Maju, Makmur, Aman dan Demokratis ". Untuk mewujudkan visi tersebut butuh kerja keras dari semua *stakeholder* yang diprakarsai dinas pendidikan setempat.

Sesuai dengan Visi Kota Metro tersebut, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Metro berdasarkan Perda No.1 Tahun 2006 Tentang RPJMD Kota Metro 2005-2010 adalah : (1) Meningkatkan Mutu; (2) Penuntasan Wajardikdas Sembilan Tahun; (3) Peningkatan Sarana dan Prasarana; (4) Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Melihat tugas pokok dan fungsi yang dimiliki dinas pendidikan tersebut, dapat dipastikan dinas pendidikan mempunyai peran utama dalam usaha mewujudkan visi Kota Metro yang ingin menjadi Kota Pendidikan yang tentu saja berkualitas. Sedangkan kualitas pendidikan selama ini dilihat dari nilai ujian. Tiga tahun terakhir nilai rata-rata ujian siswa SD di Kota Metro mengalami penurunan. Sedangkan untuk nilai rata-rata ujian siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) juga mengalami penurunan setahun terakhir sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 1.1 Data Nilai Rata-rata Ujian Tingkat Pendidikan Dasar di Kota Metro

Jenjang	Nilai Rata-rata Ujian			
	2006	2007	2008	2009
SD	6.99	7.45	7.10	6.91
MI	6.01	6.67	7.15	6.70
SLB	-	6.25	7.00	6.70

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Metro 2010

Data di atas menunjukkan bahwa *output* dari sistem pendidikan terus menurun kualitasnya. Belum lagi mengenai kualitas sumber daya manusia (guru) sekolah dasar yang cukup memprihatinkan dibandingkan dengan kualitas guru pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Metro, lebih dari setengah (53,9 %) komposisi guru sekolah dasar di Kota Metro berpendidikan D2. Baru sebanyak 24,7 % berpendidikan minimal S1/D4, sesuai yang dipersyaratkan saat ini.

Melihat hal tersebut sudah saatnya pendidikan dasar tidak hanya mengedepankan pemerataan atau segi kuantitas saja. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana peran dinas pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan (setingkat SD) dengan merujuk pada konsep pemerataan pendidikan secara aktif (dari studi Coleman). Konsep ini tidak hanya menekankan pada bagaimana pendidikan dasar tersebut dapat diakses oleh semua anak (prinsip pemerataan), akan tetapi lebih jauh berbicara mengenai mutu pendidikan.

1.2 Perumusan Masalah

Peran Dinas Pendidikan Kota Metro menjadi ujung tombak keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan setingkat sekolah dasar di Kota Metro. Perannya tersebut dilaksanakan dengan pemberian pelayanan paling tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang pendidikan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Daerah diberi kebebasan dalam pemberian pelayanan pendidikan, disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan lingkungan setempat berdasar standar yang dibuat oleh Pusat.

Penurunan nilai rata-rata ujian pada tingkat pendidikan dasar seperti yang terlihat pada tabel diatas dan masih banyaknya guru sekolah dasar yang belum memenuhi standar pendidikan minimal sebagai seorang pendidik, menimbulkan pertanyaan bagaimana selama ini peran Dinas Pendidikan Kota Metro dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Kota Metro tingkat sekolah dasar. Dari observasi awal bisa dilihat bahwa untuk sarana dan prasarana pada seluruh sekolah telah mencukupi. Bahkan, sampai saat ini terus ditingkatkan seperti pembangunan gedung perpustakaan di setiap sekolah-sekolah.

Berdasarkan permasalahan pokok di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dinas Pendidikan Kota Metro menjalankan perannya dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kota Metro;
2. Bagaimana strategi-strategi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Kota Metro.

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Pada bagian ketiga dari bab pendahuluan berisi tujuan dan signifikansi penelitian. Dua hal utama yang menjadi fokus tujuan penelitian. Sedangkan signifikansi penelitian ditinjau dari segi akademis dan segi praktis. Berikut uraian dari masing-masing tujuan dan signifikansi dari penelitian ini:

1.3.1 Tujuan penelitian adalah :

1.3.1.1 Menganalisa bagaimana Dinas Pendidikan Kota Metro menjalankan perannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Kota Metro;

1.3.1.2 Menganalisa strategi apa yang harus dijalankan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Kota Metro.

1.3.2 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.2.1 Segi Akademis

1.3.2.1.1 Diharapkan dapat memperkaya kajian dalam Administrasi Publik, khususnya mengenai pembagian urusan pemerintahan di era otonomi daerah pasca reformasi.

1.3.2.1.2 Memberikan saran dan pengembangan konsep-konsep pelayanan publik khususnya dibidang pendidikan.

1.3.2.1 Segi Praktis

1.3.2.1.1 Memberikan gambaran mengenai peran Dinas Pendidikan Kota Metro dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Kota Metro.

1.3.2.1.2 Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Kota Metro.

1.4 Kerangka Teori

Organisasi publik lebih banyak dipandang sebagai organisasi yang keberadaannya menyediakan pemenuhan berbagai kebutuhan, barang dan jasa, untuk publik. Selain itu, juga terdapat peran organisasi publik sebagai pengatur sumber daya bersama dan menetapkan aturan

main dalam penggunaan kolektif dari sumber daya bersama tersebut⁴. Mengingat peran organisasi publik yang tidak hanya sebagai penyedia barang dan jasa yang bersifat khas melainkan juga memiliki *stakeholder* yang kompleks, sehingga akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting.

Salah satu dari sekian banyak macam *public goods* adalah pendidikan. Berbagai konsep mengenai pendidikan diutarakan oleh pakar sesuai dengan latar belakang keilmuannya, diantaranya konsep pendidikan dari Rutz dan P.J. Hills yang memahami pendidikan sebagai proses belajar yang ditujukan untuk membangun manusia dengan pengetahuan dan keterampilan⁵. Pemahaman ini dikontekskan dengan upaya-upaya pembangunan sebagai tanggung jawab pemerintah melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.

Seperti halnya dengan konsep pendidikan yang memiliki banyak pengertian, pemahaman kualitas dari pendidikan itu sendiri juga berbeda-beda. Kualitas atau mutu merujuk pada kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses dan lingkungan memenuhi atau melebihi harapan⁶. Kualitas memiliki tingkat sampai sejauh mana ia mampu memenuhi harapan. Sedangkan mutu atau kualitas pendidikan diartikan sebagai kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin⁷.

⁴ John Stewart and Stewart Ranson. *Management for the Public Domain: Enabling Learnig Society*. (USA: St Martin's Press, 1994)

⁵ A. R Tilaar dan Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan (Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik, 2009)*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta). h. 40.

⁶ Endar Sugiarto. *Psikologi Pelayanan Dalam Industri Jasa*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1999). h. 38.

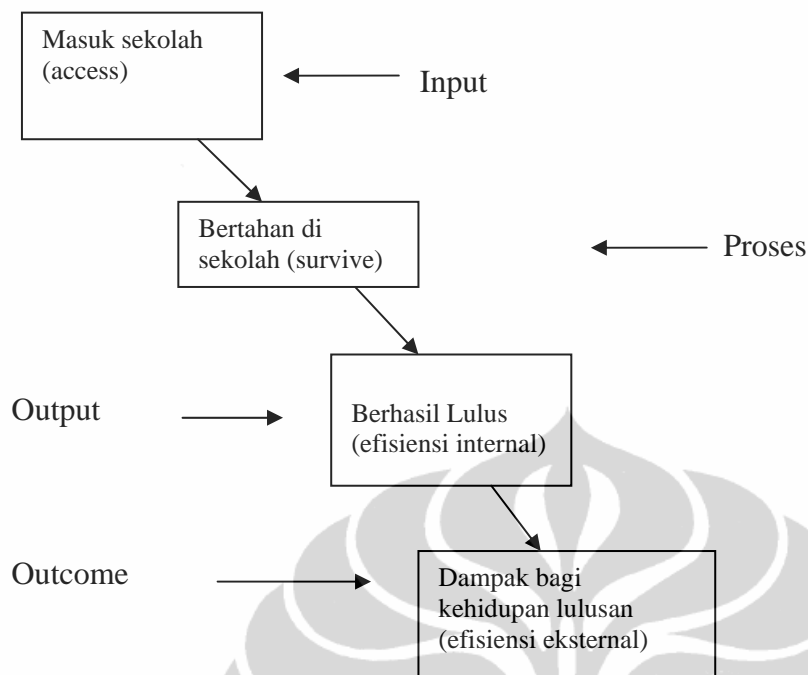
⁷ Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah. *Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional (Konsep, Teori, dan Aplikasi Dalam Analisis Kebijakan Publik)*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009). h. 197.

Konsep kualitas pendidikan juga bisa dipahami melalui dua asumsi, yaitu asumsi efisiensi teknologis dengan konsep efisiensi eksternal dan efisiensi ekonomis dengan konsep efisiensi internal⁸ (Suryadi dan Budimansyah, 2009: 200). Efisiensi teknologis akan menganggap pendidikan sebagai *public goods* yang mengedepankan pemerataan. Lain halnya jika pendidikan tersebut dianggap sebagai komoditi pasar yang sangat kompetitif sehingga kualitas *output* pendidikan sangat penting tidak seperti pada efisiensi teknologis yang mementingkan keluaran secara fisik. Lima variabel yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, yaitu: anggaran, sarana prasarana, kualitas guru, proses belajar mengajar dan manajemen/pengelolaan sekolah (penelitian Ace Suryadi mengenai Mutu Pendidikan Dasar, EPP USAID 1992)⁹.

Pemerataan kesempatan pendidikan dibedakan menjadi dua konsep (Studi Coleman), yaitu: pemerataan kesempatan pendidikan secara pasif dan pemerataan pendidikan secara aktif. Pemerataan pendidikan secara pasif lebih terfokus pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar ke sekolah (pemerataan). Sedangkan pemerataan pendidikan secara aktif lebih kepada kesempatan bagaimana murid-murid yang terdaftar tadi memperoleh hasil belajar yang setinggi-tingginya (kualitas pendidikan). Kerangka konsep tersebut digambarkan seperti di bawah ini :

⁸ Ibid., h. 200.

⁹ Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah. *op. cit.*



Sumber : Suryadi dan Budimansyah, 2009: 38

Gambar 1.1 Konsep Pemerataan Pendidikan Secara Aktif

Ketika efisiensi eksternal dapat tercapai, maka akan menghantarkan seorang individu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena sistem pendidikan telah mampu mengubahnya menjadi manusia yang produktif. Produktivitas yang tinggi bisa memberikan penghasilan yang tinggi pula yang pada akhirnya mampu meningkatkan status sosial seseorang di masyarakat, maka pada tahap ini kita bisa mengaitkannya dengan sosiologi pendidikan melalui Teori Reproduksi dalam Pemikiran Pendidikan Kritis yang pertama kali dikemukakan oleh Samuel Bowles dan Herbert Gintis.

Pemikiran Pendidikan Kritis yang menggunakan pendekatan historis-empiris ini mengemukakan bahwa pendidikan merupakan media mobilitas sosial. Apabila seorang anak dari golongan masyarakat bawah dapat dengan mudah mengakses pendidikan yang berkualitas hingga mampu membuatnya produktif kelak ketika ia dewasa sehingga mampu mengubah kehidupan perekonomiannya yang pada akhirnya mampu meningkatkan status sosial di masyarakat. Fokus Teori

Universitas Indonesia

Reproduksi adalah sekolah sebagai agen yang mereproduksi kelas sosial karena berkontribusi atau melanggengkan ketidakadilan sosial yang ada. Untuk itu, para penggagas teori ini berpendapat reformasi pendidikan akan terbatas dampaknya jika tidak dikaitkan dengan problem kekuasaan struktural dan ketidakadilan ekonomi¹⁰.

Jika dikaitkan dengan konteks di Indonesia khususnya setelah otonomi daerah maka akan terlihat penekanannya yaitu bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi generasi penerus tanpa terkecuali. Faktor-faktor yang menjadi batasan penelitian dan akan menjawab bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Metro berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan SD dijabarkan dengan menggunakan pendekatan *education production function* atau yang lebih dikenal dengan pendekatan *input-output analysis*. Pada tahap input, faktor-faktor yang diteliti adalah: kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum sekolah, sumber daya manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, prasarana dan sarana, pembiayaan. Sedangkan faktor yang diteliti pada tahap proses adalah : pengawasan proses belajar mengajar atau proses monitoring oleh tim pengawas. Faktor-faktor output yang juga turut diteliti adalah : presentase siswa *drop out* (DO) dan rata-rata nilai ujian akhir sekolah secara keseluruhan.

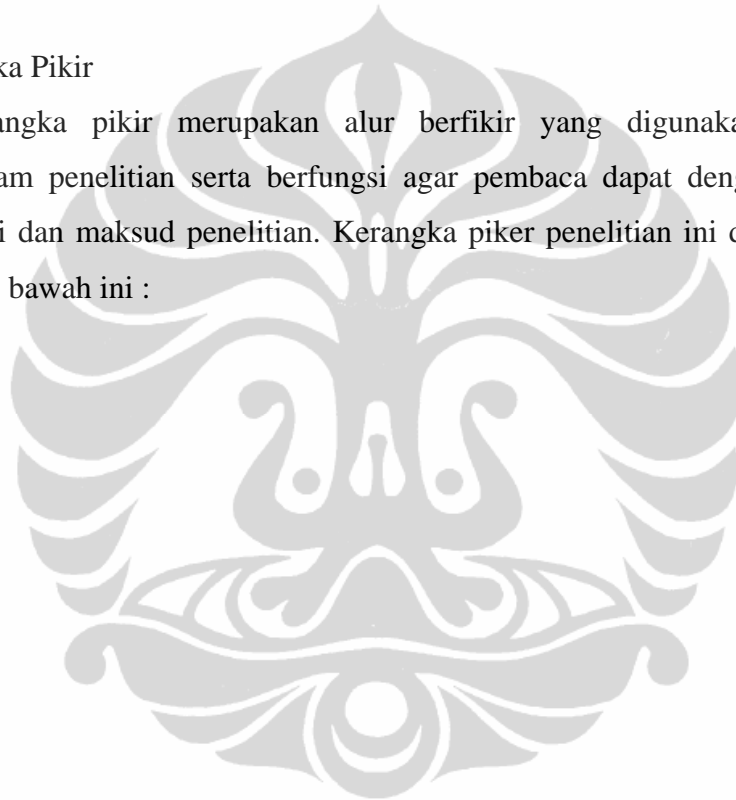
Beberapa faktor yang diteliti terbatas pada faktor-faktor standar nasional pendidikan yang dibuat oleh Badan Nasional Standar Pendidikan. Peneliti menggunakan faktor-faktor tersebut karena merupakan kriteria minimal yang bisa dijadikan pedoman penilaian kinerja sebuah dinas pendidikan atau pemerintah kota dalam memberikan pelayanan publik dalam bidang pendidikan merujuk pada konsep pemerataan pendidikan yang digunakan. Sedangkan tingkatan sekolah

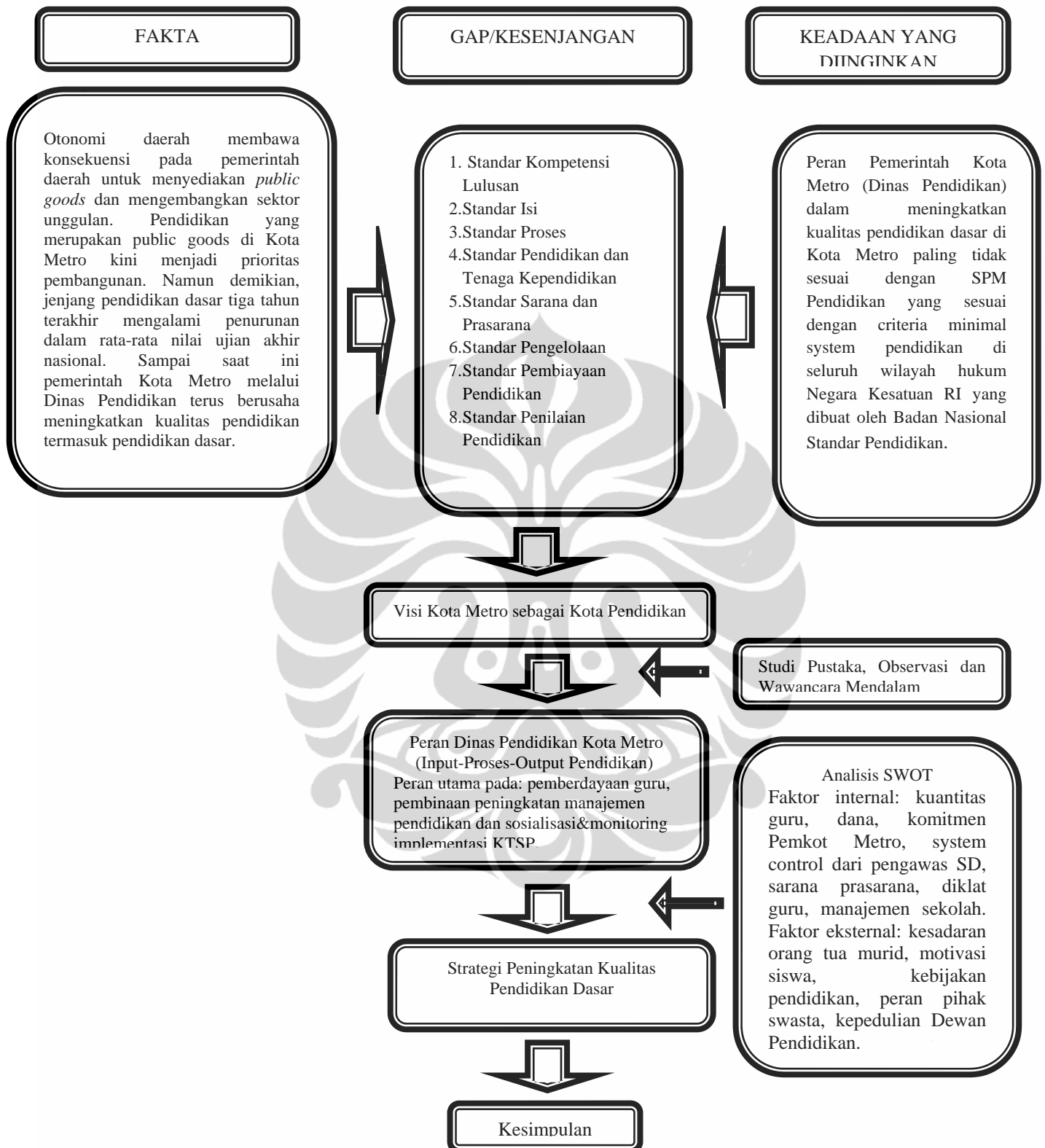
¹⁰ Agus M. Nuryatno. *Mazhab Pendidikan Kritis*. (Magelang: Resist Book, 2008). h. 63.

dasar yang dipilih karena terkait dengan jenjang paling dasar dari program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang harus dituntaskan oleh setiap daerah dengan kualitas yang telah ditentukan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat pendidikan pada tahap pendidikan dasar merupakan *public goods* yang mengutamakan kuantitas dan pemerataan. Ketika hal tersebut yang menjadi prioritas, sebaiknya juga memperhatikan kualitas. Seperti mengacu pada konsep pemerataan pendidikan secara aktif yang telah dikemukakan sebelumnya pada kerangka teori.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur berfikir yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian serta berfungsi agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dan maksud penelitian. Kerangka pikir penelitian ini ditunjukkan pada bagan di bawah ini :





Sumber : Disusun oleh peneliti

Gambar 1.2 Alur Pikir Penelitian

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari enam bab, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian serta sistematika penulisan.
2. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi berbagai konsep dan teori mengenai otonomi daerah, desentralisasi, pelayanan publik, dan pendidikan.
3. Bab 3 Metode Penelitian. Bab ini berisi pendekatan penelitian yang digunakan. Bab ini menguraikan jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, narasumber, teknik dan analisis pengolahan data yang digunakan.
4. Bab 4 Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini menggambarkan secara umum dari segi administratif, geografis dan karakteristik lain mengenai Kota Metro serta profile Dinas Pendidikan Kota Metro.
5. Bab 5 Pembahasan. Bab ini berisi analisis mengenai peran Dinas Pendidikan Kota Metro dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Kota Metro dengan menggunakan *depth interview* dan Analisis SWOT (*Strength Weakness Opportunity Treath*).
6. Bab 6 Kesimpulan dan Saran.